

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan tentang studi deskriptif mengenai Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dalam melakukan Kontrol Sosial terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung. Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program HMI Cabang Bandung dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung *pertama* dilakukan dalam bentuk tindakan preventif *kedua* dilakukan dalam bentuk refresif, tindakan preventif dilakukan untuk mengawal kebijakan pemerintahan, agar terselenggara dengan baik, hal ini dilakukan dengan HMI berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah dan yang kedua HMI melakukan pengkajian terhadap perencanaan maupun implementasi kebijakan pemerintah. Adapun aktifitas yang bersifat refresif dilakukan untuk menekan atau mengkritisi kebijakan pemerintah agar bisa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk tindakannya melalui audiensi ataupun Aksi demonstrasi. Program ini dilatar belakangi *pertama* sebagai organisasi yang bersifat independen, *kedua* berperan sebagai organisasi perjuangan dan yang *ketiga* memiliki tujuan HMI yaitu terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*. mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, sebagai bentuk upaya untuk mencapai tujuan organisasinya.
2. Sikap HMI terhadap implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung. *Pertama* mengambil sikap sebagai mitra kritis terhadap kebijakan pemerintah, artinya bahwa HMI mencoba mengambil peranan sebagai pendukung kebijakan pemerintah ketika kebijakan itu bertujuan dan memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat, dan HMI mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika kebijakan itu

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua* namun dalam realisasi aktifitasnya baik itu tataran organisasi pemuda yang mewakili masyarakat maupun pemerintah belum merasakan dampak signifikan dari upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh HMI hal ini dikarenakan belum banyak peranan HMI dalam melakukan perubahan yang signifikan atau adanya solusi yang konstruktif yang diberikan oleh HMI dalam memberikan kontrol atau kritikan terhadap implementasi kebijakan pemerintah.

3. Hambatan yang dihadapi oleh HMI terbagi kedalam dua hal yaitu hambatan dari internal, dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu; *pertama* Kurangnya kerja sama antar bidang karena setiap bidang yang terfokus pada program bidangnya sendiri. *Kedua* konflik internal kepengurusan dampak dari perbedaan pendapat di internal kepengurusan. *Ketiga* kurang optimalnya kinerja pengurus karena konsentrasi yang harus terbagi antara tanggung jawab akademik dan tanggung jawab terhadap amanah yang dipegang di organisasi. *Keempat* kurang aktifnya anggota HMI atau kader HMI dalam kegiatan atau aktifitas kontrol sosial yang dilakukan oleh HMI. Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh pengurus HMI Cabang Bandung dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung yaitu; *Pertama* kekhawatiran munculnya opini negatif dari alumni HMI Cabang Bandung karena Ridwan Kamil walaupun bukan alumni HMI tapi anak kesayangan dari alumni HMI. *Kedua* tidak semua pihak di luar HMI bisa menerima itikad baik yang dilakukan oleh HMI terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung. *Ketiga* belum mampunya HMI menjadi inisiator pemersatu semua organisasi pemuda maupun mahasiswa agar gerkannya bisa masif dan memberikan dampak besar bagi perubahan yang dicita-citakan.
4. Upaya yang dilakukan oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dalam mengatasi masalah upaya kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung yaitu; *Pertama* penguatan mengenai landasan gerak dan landasan

perjuangan melalui motivasi yang diberikan oleh ketua umum dan kajian dan kajian rutin. Tujuan dari penguatan landasan gerak dan landasan perjuangan HMI adalah untuk menumbuhkan kembali *sense of belonging* terhadap organisasi dan menumbuhkan prinsip kolektif kolegial didalam organisasi. bahwa tanggung jawab menyelesaikan tugas bidang bukan hanya kewajiban bidangnya saja meliankan tanggung jawab bersama kedua untuk mengatasi konflik yang sering terjadi diinternal kepengurusan yang berdampak pada menurunnya produktifitas pengurus adalah dengan penerapan pola kerja kolaborasi dan enjauhi ikap kerja yang beraing secara negatif ketiga pemberian pemahaman kepada pengurus dan kader mengenai pentinngnya management waktu agar bisa menjalankan tanggung jawab akademik dan tanggung jawab organisasi.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas maka implikasi dari penelitian yang peneliti lakukan adalah HMI sebagai organisasi mahasiswa yang mempunyai peranan sebagai *agent of control social dan agent of political control* harus melakukan inovasi-inovasi dalam gerakannya untuk melakukan kontrol terhadap kebijakanpemerintah Kota Bandung, agar keberadaan HMI dalam melakukan kontrol sosial dapat lebih dirasakan baik itu dikalangan mahasiswa, masyarakat maupun dikalangan pemerintah.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang mudah mudahan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait maupun untuk peneliti selanjutnya adapun rekomendasi yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk HMI Cabang Bandung
 - a. Harus ada pembenahan di internal kepengurusan dan penataam kembali organisasi HMI yang ada dalam wilayah kerja HMI Cabang Bandung

dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. hal ini bisa dilakukan melalui penyamaan persepsi dalam pengurus HMI, dan memperbanyak up greading sebagai upaya penyolidan pengurus.

- b. Penanaman kembali spirit organisasi dalam kepengurusan maupun kepada kader, dengan penguatan landasan pergerakan dan landasan perjuangan HMI. hal ini bisa dilakukan melalui pengkajian mengenai mission HMI, dan NDP sebagai landasan gerak HMI.
 - c. Melakukan analisis yang matang mengenai kinerja dan program pemerintah baik yang berbentuk dokumen maupun yang terlihat secara fisik, agar kontrol sosial yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah dapat lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan atau *goals* yang di harapkan.
 - d. HMI harus bisa menjadi motor penggerak bagi organisasi organisasi lainnya untuk sama-sama berjuang melakukan kontrol sosial terhadap implementasi kebijakan pemerintah. agar gerakannya bisa lebih masif dan signifikan.
2. Untuk perguruan tinggi di Kota Bandung
- a. Perguruan tinggi yang ada di wilayah Bandung haruslah mampu memberikan kesadaran kepada mahasiswa tentang peran dan fungsinya sebagai *agent of control social and political control* hal ini penting untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
 - b. Perguruan tinggi harus memberikan support terhadap kepedulian dan kepekaan mahasiswa serta pergerakannya dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung. hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan monitoring evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa.

3. Untuk pemerintahan Kota Bandung

- a. Pemerintah kota Bandung Harus lebih terbuka dalam penyampaian informasi serta dalam menerima kritik sosial yang konstruktif yang di berikan oleh mahasiswa atau elemen masyarakat.
 - b. Pemerintah dalam implementasi kebijakan harus menyesuaikan dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
4. Untuk departemen pendidikan kewarganegaraan
- a. Berikan pemahaman kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa, yang merupakan *agent of control sosial*, dan bentuk dharma bakti terhadap negara.
 - b. Mendukung dan mendorong mahasiswa agar terlibat dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ekstra universiter untuk meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa.
5. Untuk Himpunan Mahasiswa Civic Hukum
- a. Sebagai salah satu organisasi mahasiswa, HMCH yang didalamnya mahasiswa PKn harus mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Mahasiswa PKn harus melakukan pengkajian yang mengenai kebijakan pemerintah Kota Bandung, sebagai bentuk pengimplementasian atas materi pelajaran yang dipelajari.
6. Untuk peneliti selanjutnya
- a. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya senantiasa menambah wawasan keilmuan mengenai peranan mahasiswa, kebijakan pemerintah, dan fungsi kontrol yang bisa di lakukan sebagai gambaran umum sebelum melakukan penelitian.
 - b. Kedua yang harus dilakukan adalah memperbanyak informasi yang bisa mempermudah peneliti dalam mengembangkan penelitiannya.